

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah telah diatur dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dengan prinsip yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan (*power sharing*) maupun desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*)

Dengan ditetapkannya UU Nomor 33 pada tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah menggantikan undang-undang sebelumnya UU Nomor 25 pada tahun 1999. Atas keterkaitannya dari undang-undang di atas dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang di rencanakan oleh pemerintah di era reformasi sehingga paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip:

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
2. Asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota
3. Pemberdayaan masyarakat serta
4. Pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat arus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan

Dalam otonomi daerah sendiri terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.

Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Kota Pontianak adalah salah satu Kota/Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Kemampuan Kota Pontianak dalam menggali potensi kemampuan daerah yang dimilikinya dapat terlihat dari perolehan PAD pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Pontianak
Tahun 2007-2013 (jutaan rupiah)

TAHUN	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		Total PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2007	30.486	31.082	18.980	14.387	1.438	1.439	16.042	10.968	66.947	57.876
2008	34.870	35.970	19.922	17.841	1.587	1.439	19.215	8.956	75.595	64.207
2009	41.738	43.504	21.202	16.031	1.857	1.848	8.202	4.464	72.999	65.848
2010	56.415	58.770	21.145	18.305	2.035	1.899	17.000	8.394	96.595	87.368
2011	104.409	117.806	26.839	23.940	2.237	2.056	8.332	7.336	141.817	151.139
2012	157.421	162.782	29.194	26.993	2.791	2.246	18.089	16.607	207.495	208.629
2013	177.730	179.655	66.193	53.412	9.190	8.554	54.932	23.650	308.046	265.272

sumber data : BPKAD Kota Pontianak

Pada tabel 1.1 dapat dilihat target dan realisasi PAD Kota Pontianak pada setiap sektor berfruktusasi setiap tahunnya. Keempat sektor PAD, sektor Pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar dengan rata-rata target pendapatan sebesar 86 milyar dapat merealisasikan rata-rata penerimaannya sebesar 90 milyar. Sedangkan sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang

paling rendah dibandingkan sektor PAD lainnya dengan rata-rata target sebesar 3 milyar hanya dapat merealisasikan rata-rata penerimaannya sebesar 2,8 milyar.

Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak peranan bantuan dari pemerintah pusat masih relatif tinggi untuk mengatasi permasalahan dan ketimpangan yang terjadi. Untuk mengetahui seberapa besar dana perimbangan termasuk bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman yang disebut dengan pendapatan dari pihak ekstern dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Pendapatan Dari Pihak Ekstern Kota Pontianak
Tahun 2007-2013 (jutaan rupiah)

No	DANA PERIMBANGAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan pajak	49.794	50.060	53.107	65.606	54.489	65.165	44.967
2	Dana Alokasi Umum	369.581	399.352	404.240	408.180	453.729	549.629	626.879
3	Dana Alokasi Khusus	33.667	40.768	42.293	25.380	34.169	44.754	28.031
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	45.597	64.303	100.184	179.166	227.200	208.168	281.940

sumber data : BPKAD Kota Pontianak

Pada tabel 1.2 dapat dilihat pendapatan dari pihak ekstern meningkat setiap tahunnya Seperti yang diketahui pendapatan dari pihak ekstern terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Lainnya. Komponen Dana Alokasi Umum merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap pendapatan dari pihak ekstern. Hal ini dipengaruhi oleh bobot daerah, yang dinilai berdasarkan indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, dan indeks kemiskinan relatif yang dikemudian dibagi 4 (empat) dan dikalikan dengan pengeluaran daerah rata-

rata. Berbeda dengan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mempertimbangkan untuk pembiayaan kebutuhan yang bersifat khusus, misalnya kebutuhan beberapa jenis prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, dan sebagainya.

Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat untuk mengurangi disparitas fiskal horisontal. Harapan yang di inginkan pemerintah pusat yaitu daerah mempunyai tingkat kesiapanfiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah sehingga daerah tersebut mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif. Sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik Hal ini jugalah yang diharapkan agar kemandirian daerah menjadisemakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi bukan malah sebaliknya. Untuk melihat pengeluaran belanja yang di realisasi pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Kota Pontianak
Tahun 2007-2013 (jutaan rupiah)

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)	Belanja Langsung (Belanja Pembangunan)	Total Belanja
2007	256,792	280,471	537,263
2008	308,047	325,548	633,595
2009	315,972	342,871	658,842
2010	387,091	365,776	752,867
2011	438,765	452,907	891,672
2012	487,154	519,338	1,006,493
2013	563,852	745,307	1,309,159

sumber data : BPKAD Kota Pontianak

Pada tabel 1.3 dapat dilihat realisasi belanja kota Pontianak baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung meningkat setiap tahunnya. dengan porsi belanja tidak langsung sekitar 48,07 % dan belanja langsung sekitar 51,93%. untuk belanja tidak langsung lebih didominasi oleh belanja pegawai rata-rata sebesar 389,837 milyar sedangkan Belanja langsung lebih didominasi oleh belanja modal rata-rata sebesar 242,434 milyar atau rata-rata sebesar 55,09 %. Sehingga dapat diketahui porsi belanja pegawai pada belanja tidak langsung rata-rata persentasenya lebih besar yaitu 61,66 % dibandingkan dengan belanja modal pada belanja langsung yang rata-rata persentasenya hanya sebesar 38,34%.

Belanja dari suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2013 di Kota Pontianak?
2. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007-2013 dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2013 di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007-2013 dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Pontianak.

1.4 Mamfaat Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa kepentingan antara lain:

1. Kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang

yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya.

2. Memberikan pengembangan ilmu bagi para pembaca dan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademis yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan peningkatan wawasan di bidang ekonomi, sehingga penulis dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

Universitas Tanjungpura